



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI MOCHTAR JAYA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN. HUKUM DAN POLITIK
3. NHK : 728073

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/135 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
2. Tanah Seluas 1.652 m2 di KAB / KOTA MUNA, WARISAN Rp. 65.000.000		
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
4. Tanah Seluas 995 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1,5 R/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	96.419.582
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	758.419.582
III. HUTANG	Rp.	216.263.694
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	542.155.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.